

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (sekarang menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014) tentang Pemerintah Daerah. Urusan pemerintah sebagian dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Urusan pemerintah yang pada saat sebelum reformasi sebagian besar ditangani oleh pemerintah pusat, maka setelah reformasi sebagian besar urusan pemerintah tersebut dilimpahkan ke daerah. Pengalihan ini juga berdampak pada pengalihan anggaran untuk Pelaksanaan pemerintahan di daerah serta untuk pembangunan daerah. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan.

Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, berupa Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil

ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pendapatan Asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil : (Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah).

Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting fungsinya baik untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan alternatif pilihan dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, selain dari dana yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam Pendapatan Daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

Namun sebaliknya masalah yang dihadapi oleh sebagian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Riau, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari situs berita www.Riau12.com

disebutkan bahwa “Provinsi Riau Kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1 milyar setiap tahunnya, hal ini diungkapkan oleh Ketua komisi C DPRD Riau Aherson, hal ini terjadi karena banyaknya tunggakan-tunggakan pajak, baik pajak kendaraan, pajak air bawah tanah dan retribusi penempatan atm di beberapa titik di kantor-kantor pemerintahan”. Hal seperti ini tentunya tidak boleh terjadi karena kehilangan Pendapatan Asli Daerah sebesar itu dapat menghambat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau dan juga akan mengurangi peranan/kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu elemen penting dalam penyumbang Pendapatan Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapa besar tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau pada tahun 2007-2016 ?
2. Berapa besar tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah di Provinsi Riau Pada tahun 2007-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Pada tahun 2007-2016.

2. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2007-2016.

1.4 Manfaat penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pendapatan Daerah dan Akuntansi Sektor Publik.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah Daerah yang ada di Provinsi Riau.
3. Bagi pemerintah daerah (Badan Pendapatan Provinsi Riau), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal Pendapatan Daerah di waktu yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Penelitian ini akan menganalisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Adapun data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Baihaqi (2010) Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dengan judul Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dan tahun penelitiannya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau dengan tahun penelitian dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan penelitian Baihaqi (2010) yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu dengan tahun penelitian dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008.

1.6 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Kajian Pustaka

Merupakan kajian pustaka yang berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai , objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV

Merupakan hasil dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB V

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah“ Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”APBD adalah suatu anggaran daerah. Yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya satu tahun.

2.1.3 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah saldo anggaran dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mahmudi (2010), “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan

PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

A. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Suandy (2011 : 226) pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

B. Retribusi Daerah

Secara umum Restribusi adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara langsung.

C. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah seperti bagi hasil laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD dan bagian modal atas penyertaan modal koperasi.

Menurut Abdul Halim, “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan” Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah seperti hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.

Menurut Halim, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

2.1.5 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Baihaqi (2010) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$G = \frac{PAD(t) - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G : Tingkat pertumbuhan PAD

PAD(t) : Jumlah PAD tahun sekarang

PAD(t-1) : Jumlah PAD tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan dalam menilai Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 2.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Petumbuhan PAD

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang Dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (Syafitri : 2016).

2.1.6 Analisis Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Baihaqi : 2010)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Total Pendapatan asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah :

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Dalam Sari, 2013)

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Baihaqi (2010) Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu dengan judul Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 belum begitu berperan dalam Pendapatan Daerah.
 - b. Kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 untuk sektor pajak daerah telah sangat berperan terhadap PAD.
 - c. Kontribusi komponen PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 dari setiap sector masih harus ditingkatkan lagi agar dapat lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
 - d. Tingkat pertumbuhan PAD dan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu periode 2005-2008 secara keseluruhan masih harus di tingkatkan lagi terutama untuk penerimaan PAD.
2. Dhyni Inka Syafitri (2016) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Lain-Lain Pad Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah hasil penelitiannya adalah:
- a. Berdasarkan rasio efektivitas, rata-rata efektivitas pajak daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah sebesar 124,34%, retribusi daerah sebesar 106,03% dan lain-lain PAD yang sah sebesar 126,46 % hal ini menunjukkan rata-rata pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah sangat efektif karena selama tiga tahun pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memiliki tingkat efektivitas lebih dari 100%.

- b. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan, tingkat pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2011-2013 secara berurutan adalah sebesar 60,92%, 35,73%, dan 40,53%. Untuk pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2011-2013 secara berurutan yaitu sebesar -6,55%, -15,98% dan 11,95% dan berada pada kriteria tidak berhasil.. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2011-2013 secara berurutan yaitu sebesar 35,82%, 60,61%, dan 19,17%. Lain-lain PAD yang sah selalu menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun memiliki angka yang positif, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan lain-lain PAD yang sah selalu meningkat.
- c. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2010 sebesar 25,83%, tahun 2011 sebesar 32,98%, tahun 2012 sebesar 34,23% dan pada tahun 2013 sebesar 38,51% kontribusi pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya hal ini disebabkan karena terdapat penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan pusat. Kontribusi retribusi daerah pada tahun 2010 sebesar 35,56%, tahun 2011 sebesar 26,36%, tahun 2012 sebesar 16,94%, dan pada tahun 2013 sebesar 15,18% dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil. Sementara kontribusi lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010 sebesar 33,64%, tahun 2011 sebesar 36,25%, tahun 2012 sebesar 44,52%, dan pada tahun 2013 sebesar 42,47%.
3. Gita Dinata (2013) Fakultas Ekonomi program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang dengan judul Analisis Kontribusi PAD Terhadap Belanja

Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

- a. Kontribusi PAD sesudah otonomi daerah lebih rendah dari pada sebelum otonomi daerah.
- b. Pertumbuhan PAD lebih tinggi dari pada sebelum otonomi daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan. Jendral Sudirman No.6 Simpang Tiga, Pekanbaru.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. "Penelitian deskriptif adalah suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. (Anwar, 2014 : 28).

Pada penelitian deskriptif membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan menganalisis temuan-temuan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk laporan pendapatan daerah dalam kurun waktu 11 tahun sejak tahun 2006–2016 yang diperoleh dari website resmi Pemerintah Provinsi Riau (<http://e-keuanganriau.go.id>) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (<http://riau.bps.go.id>) Data tersebut meliputi data Pendapatan Daerah dari tahun 2006 sampai dengan 2016.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan, pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data Penerimaan Pendapatan Daerah.

3.5 Teknik Analisis Data

Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai Pertumbuhan dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

3.5.1 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Analisis pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Baihaqi (2010) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$G = \frac{PAD(t) - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

G : Tingkat pertumbuhan PAD

PAD(t) : Jumlah PAD tahun sekarang

PAD(t-1) : Jumlah PAD tahun sebelumnya

Kriteria yang digunakan dalam menilai Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah:

Tabel 3.1
Klasifikasi Kriteria Nilai Petumbuhan PAD

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang Dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (Syafitri : 2016).

3.5.2 Analisis Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah (Baihaqi : 2010)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Total Pendapatan asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah :

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Dalam Sari, 2013)

3.6 Jadwal Penelitian

Berikut adalah rencana jadwal Penelitian yang akan dilaksanakan :

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017			
		Desember	Januari	Februari	April s/d Juni
1	Pengajuan Judul dan Pengumpulan Data Penelitian				
2	Penyelesaian Proposal Dan Seminar Proposal				
3	Penyelesaian Skripsi dan Seminar Skripsi				